

Siaran Pers

Seminar Kebudayaan Indonesia: Peran Kebudayaan Dalam Pembangunan Nasional

JAKARTA (4/4) – Kemajemukan di Indonesia adalah realitas sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, namun tidak harus dimaknai sebagai kelemahan yang menjadikan Indonesia rentan konflik dan disintegrasi. Kemajemukan justru dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional Indonesia sehingga menjadi negara-bangsa yang kuat dan unggul. Disamping itu, pembangunan nasional harus mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, namun juga mempertimbangkan aspek budaya.

Hal ini yang menjadi landasan diselenggarakannya Seminar Nasional ‘Peran Kebudayaan Dalam Pembangunan Nasional’ yang diadakan oleh Kedepuitan Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas bekerjasama dengan *Knowledge Sector Initiative* (KSI) pada hari ini (4/4) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaring aspirasi serta memperoleh saran dan masukan dari para ahli di bidang kebudayaan, baik sebagai praktisi, akademisi, pengamat, dan lain-lain. Masukan tersebut akan dijadikan sebagai salah satu sumber informasi oleh Kedepuitan Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional yang akan diselenggarakan oleh Bappenas pada akhir bulan April, disamping kontribusi positif bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Indonesia di masa depan.

“Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang demikian besar. Kebudayaan kita ini harus menjadi modal penting yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Lihat misalnya Jepang, Korea Selatan, atau China yang mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui suatu proses modernisasi,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

“Pemerintah Australia dengan bangga mendukung seminar ini melalui Knowledge Sector Initiative (KSI). Sesuai dengan tujuan programnya, KSI berusaha untuk memperkuat sektor pengetahuan di Indonesia dengan mendukung proses pembuatan kebijakan publik yang akan memberi manfaat terhadap masyarakat banyak”, demikian dijelaskan Fleur Davis, Minister-Counsellor pada Kedutaan Besar Australia.

Seminar ini dibuka oleh Bapak Bambang Brodjonegoro (Menteri PPN/Kepala Bappenas), dengan menghadirkan beberapa pembicara seperti Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Saur Marlina (Butet) Manurung (Pendiri Sokola Rimba), Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud), Amich Alhumami (Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Bappenas), Hans Antlov (Antropolog/KSI), Melani Budianta (Pakar Budaya FIB UI), dan Dynand Fariz (Presiden Jember Fashion Carnival/JFC).

Para pembicara di atas akan membahas secara komprehensif hubungan antara kebudayaan dengan pembangunan. Beberapa topik pembahasan antara lain, peta jalan pembangunan kebudayaan Indonesia, dinamika kebudayaan dalam pembangunan, *local knowledge* sebagai modal pembangunan, memahami kebudayaan dalam konteks pembangunan, strategi pembangunan kota budaya, transformasi pendidikan melalui pendekatan budaya lokal dan kebutuhan masyarakat adat, dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal.

Kegiatan ini juga disemarakan dengan pentas seni dan pameran budaya seperti benda cagar budaya, karya seni kontemporer, hasil budaya inovasi, dan koleksi naskah kuno. Naskah kuno yang dipamerkan merupakan naskah Master Piece Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai *Memory of the World*, yaitu Nagarakretagama, Babad Diponegoro, I La Galigo. Selain itu, dipamerkan pula beragam naskah yang sangat relevan dengan situasi Indonesia dewasa ini, yang dapat direvitalisasi dan dikembangkan seperti naskah pengobatan tradisional, arsitektur, pangan, dan pertanian.

Penyelenggaraan Seminar Nasional Peran Kebudayaan dalam Pembangunan merupakan upaya untuk menjangkau aspirasi, serta memperoleh saran dan masukan dari para ahli di bidang kebudayaan, baik sebagai praktisi, akademisi, pengamat, dan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, modern, dan berdaya saing dengan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Tentang Knowledge Sector Initiative (KSI)

KSI adalah sebuah program kerja sama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik yang berbasis pada penelitian, analisa dan bukti. Dukungan KSI terhadap Bappenas telah diselenggarakan sejak 2013. Informasi lebih lanjut mengenai KSI dapat diakses di situs <http://www.ksi-indonesia.org/>

Jakarta, 4 April 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id